

AUDIT READINESS ATAS LAPORAN KEBERLANJUTAN: TANTANGAN BARU BAGI AUDITOR DI ERA ESG DISCLOSURE

Hana Safitri¹, Dermawan², Ivan Arba³, Wahyuni⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: ¹hnsftry196@gmail.com, ²dermawanlapporan@gmail.com, ³ivanarba99@gmail.com

⁴wahyuni@unismuh.ac.id

Abstrak

Perkembangan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mendorong perusahaan untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap para pemangku kepentingan. Seiring dengan meningkatnya regulasi dan tuntutan transparansi, auditor dituntut untuk siap dalam melakukan pemeriksaan atas laporan non-keuangan yang kompleks dan bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan auditor (audit readiness) dalam mengaudit laporan keberlanjutan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam era ESG disclosure. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama meliputi kurangnya standar audit yang seragam, keterbatasan kompetensi auditor dalam isu ESG, serta kebutuhan kolaborasi lintas disiplin. Hasil penelitian ini memberikan wawasan awal mengenai pentingnya peningkatan kapasitas auditor dan penguatan kerangka regulasi guna memastikan keandalan laporan keberlanjutan.

Kata kunci: Audit readiness, laporan keberlanjutan, ESG disclosure, tantangan auditor, audit non-keuangan

Abstract

The growing emphasis on environmental, social, and governance (ESG) issues has driven companies to publish sustainability reports as a form of accountability to stakeholders. Alongside increasing regulatory pressures and demands for transparency, auditors are expected to be prepared to examine complex and qualitative non-financial reports. This study aims to analyze the audit readiness of auditors in auditing sustainability reports and to identify the challenges they face in the era of ESG disclosure. Using a qualitative approach and literature review, the study finds that the main challenges include the lack of standardized audit frameworks, limited auditor competence in ESG-related matters, and the need for interdisciplinary collaboration. The findings provide initial insights into the importance of enhancing auditor capacity and strengthening regulatory frameworks to ensure the reliability of sustainability reporting.

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no

886 Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i

2.359 Copyright :

author Publish by :

musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Keywords: *Audit readiness, sustainability report, ESG disclosure, auditor challenges, non-financial audit*

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu keberlanjutan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kesadaran global terhadap perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan praktik tata kelola perusahaan. Perusahaan kini dituntut untuk tidak hanya mencatat kinerja keuangan, tetapi juga melaporkan dampak kegiatan mereka terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan menjadi bagian penting dari pelaporan korporat yang bertujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (KPMG, 2022; PwC, 2023).

Di Indonesia, kebijakan terkait keberlanjutan telah diperkuat melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mengatur tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Sejak itu, semakin banyak perusahaan—terutama di sektor jasa keuangan—yang menerbitkan laporan keberlanjutan secara berkala. Namun demikian, meskipun pelaporan keberlanjutan terus berkembang, kesiapan auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut (audit readiness) masih menjadi persoalan penting (Hermawan et al., 2023). Informasi ESG bersifat kualitatif, kompleks, dan seringkali tidak terstandarisasi, sehingga membutuhkan pendekatan audit yang berbeda dengan laporan keuangan (IAASB, 2023).

Audit readiness terhadap laporan keberlanjutan memerlukan kompetensi tambahan, mulai dari pemahaman terhadap prinsip-prinsip ESG, penguasaan metodologi audit non-keuangan, hingga penguasaan standar assurance terbaru. Menurut OECD (2022), masih banyak auditor yang belum mendapatkan pelatihan memadai di bidang ESG assurance. Selain itu, perbedaan standar pelaporan dan kurangnya regulasi internasional yang seragam juga memperumit proses audit keberlanjutan (IFAC, 2021; Deloitte, 2022). Penelitian oleh Rahman dan Lestari (2022) menunjukkan bahwa auditor di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengakses data ESG yang reliabel, serta kurangnya keterlibatan multidisiplin dalam proses audit. Padahal, akurasi dan keandalan laporan keberlanjutan sangat dibutuhkan oleh investor, regulator, dan masyarakat. Bila auditor tidak siap, maka assurance yang diberikan atas laporan keberlanjutan dapat menjadi tidak kredibel dan hanya bersifat formalitas (Mulyani et al., 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesiapan auditor (audit readiness) dalam mengaudit laporan keberlanjutan serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi di era ESG disclosure. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan strategi peningkatan kapasitas auditor, serta pengembangan regulasi dan standar auditing keberlanjutan di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Audit Readiness

Audit readiness merujuk pada tingkat kesiapan suatu entitas atau auditor dalam menghadapi proses audit, baik dari sisi dokumentasi, prosedur, maupun kompetensi (Suherman & Nasution, 2021). Dalam konteks keberlanjutan, audit readiness menekankan kemampuan auditor untuk memahami struktur laporan keberlanjutan, standar pelaporan yang digunakan, serta memiliki alat dan metodologi yang relevan untuk melakukan assurance terhadap informasi non-keuangan (Deloitte, 2022). Menurut IFAC (2021), audit readiness pada laporan keberlanjutan menuntut keterampilan multidisiplin, termasuk pemahaman isu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Audit readiness juga mencakup kesiapan dari sisi organisasi yang diaudit, seperti ketersediaan data ESG yang terstruktur, transparansi proses, dan integrasi antara pelaporan keuangan dan non-keuangan.

(KPMG, 2022). Tanpa kesiapan ini, proses audit terhadap laporan keberlanjutan dapat menjadi tidak efektif dan gagal menghasilkan assurance yang kredibel.

2. Laporan Keberlanjutan Dan ESG Disclosure

Laporan keberlanjutan adalah laporan yang disusun perusahaan untuk mengungkapkan dampak kegiatan bisnisnya terhadap aspek lingkungan (E), sosial (S), dan tata kelola (G) secara sistematis dan terstruktur (GRI, 2023). ESG disclosure merupakan bagian dari laporan keberlanjutan yang mencerminkan transparansi perusahaan terhadap risiko dan kinerja di bidang ESG (PwC, 2023). Menurut OECD (2022), pelaporan ESG menjadi penting karena semakin banyak investor dan regulator yang menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi risiko jangka panjang perusahaan. Di Indonesia, laporan keberlanjutan diwajibkan untuk lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 (OJK, 2020). Disclosure ini mencakup kebijakan keberlanjutan, strategi pengelolaan risiko ESG, serta pengukuran dampak dari aktivitas bisnis terhadap lingkungan dan sosial.

3. Standar Pelaporan Keberlanjutan

Beberapa standar dan pedoman pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional dan nasional antara lain: GRI (Global Reporting Initiative): Merupakan kerangka pelaporan keberlanjutan paling umum yang digunakan secara global. GRI menyediakan indikator pengungkapan untuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi (GRI, 2023). SASB (Sustainability Accounting Standards Board): Fokus pada pengungkapan informasi material yang relevan bagi investor di masing-masing industri. Integrated Reporting (IR): Menggabungkan laporan keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan terintegrasi untuk menciptakan nilai jangka panjang (IIRC, 2021). POJK No. 51/POJK.03/2017: Mengatur kewajiban pelaporan keberlanjutan di Indonesia, terutama bagi sektor jasa keuangan. IFRS S1 dan S2 (ISSB): Standar baru dari International Sustainability Standards Board yang akan menjadi dasar global untuk pelaporan keberlanjutan berbasis investor (IFRS Foundation, 2023). Kehadiran berbagai standar ini menciptakan tantangan tersendiri bagi auditor, karena tidak ada satu kerangka universal yang digunakan oleh semua perusahaan.

4. Peran dan Tanggung Jawab Auditor dalam Mengaudit Laporan Non-Kuangan

Auditor berperan memberikan assurance atas informasi non-keuangan melalui proses audit atau limited review terhadap laporan keberlanjutan. Tanggung jawab utama auditor adalah memberikan opini independen tentang apakah informasi yang disajikan dalam laporan ESG dapat dipercaya dan telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku (IAASB, 2023). Jadi, bisa disimpulkan bahwa teori-teori seperti RBV, BSC, dan SMA sangat membantu dalam memahami bagaimana perusahaan seperti Meta menggunakan data, khususnya dari Instagram, untuk meningkatkan kinerja dan tetap unggul dalam persaingan yang sangat ketat di era digital ini. Dalam laporan keberlanjutan, auditor tidak hanya menilai akurasi angka, tetapi juga menilai konsistensi narasi, keberadaan bukti pendukung, serta proses pelaporan yang dilakukan oleh entitas (Cohen & Simnett, 2021). Dibandingkan dengan audit laporan keuangan, audit ESG menuntut pemahaman lintas sektor dan melibatkan pertimbangan profesional yang lebih tinggi, mengingat sifatnya yang kualitatif dan seringkali subjektif.

5. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengkaji audit keberlanjutan. Hermawan et al. (2023) menemukan bahwa auditor di Indonesia menghadapi keterbatasan kompetensi dan minimnya pelatihan terkait ESG assurance. Penelitian Rahman dan Lestari (2022) juga menunjukkan bahwa mayoritas firma audit belum mengintegrasikan prosedur audit ESG secara sistematis ke dalam praktik mereka. Studi internasional oleh IFAC (2021) dan IAASB (2023) menyoroti perlunya standar audit ESG global untuk memperkuat kredibilitas assurance. Sementara itu, penelitian Martínez-Ferrero et al. (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa assurance eksternal

atas laporan ESG cenderung memiliki biaya modal yang lebih rendah, menunjukkan bahwa audit ESG berkontribusi pada nilai perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai tingkat audit readiness atas laporan keberlanjutan di era ESG disclosure. Penelitian kualitatif digunakan karena fokus utama kajian ini bukan pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman fenomena secara holistik, melalui eksplorasi konten laporan keberlanjutan dan interpretasi data dokumen yang bersifat tekstual.

Pendekatan yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang melibatkan penelusuran dan analisis sistematis terhadap dokumen-dokumen sekunder, khususnya laporan keberlanjutan, laporan tahunan, serta dokumen peraturan dan pedoman pelaporan ESG dari berbagai sumber terpercaya. Studi dokumentasi dipilih karena sesuai untuk menggali informasi aktual yang telah dipublikasikan secara resmi oleh perusahaan maupun regulator.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keberlanjutan (sustainability reports) dari beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpilih yang secara aktif terlibat dalam penerapan prinsip ESG dan telah menerbitkan laporan keberlanjutan sesuai dengan POJK No. 51/POJK.03/2017. Periode laporan yang dianalisis mencakup tahun 2021 hingga 2023, dengan pertimbangan bahwa pada periode tersebut telah terjadi peningkatan perhatian terhadap ESG baik dari sisi regulasi maupun praktik pasar. Adapun perusahaan yang dijadikan sampel studi ini antara lain:

- a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI)
- b. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)
- c. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN)

Pemilihan perusahaan BUMN didasarkan pada ketersediaan laporan yang lengkap, keterwakilan sektor (perbankan, telekomunikasi, dan energi), serta peran signifikan mereka sebagai agen pelaksana kebijakan keberlanjutan negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengakses dan mengumpulkan data sekunder melalui berbagai dokumen tertulis resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan meliputi:

Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) tahun 2021, 2022, dan 2023 dari masing-masing perusahaan BUMN; Laporan Tahunan (Annual Report) untuk mendukung pemahaman terhadap strategi dan kinerja perusahaan; Dokumen regulasi dan standar pelaporan, seperti GRI Standards, IFRS Sustainability Standards (ISSB S1 dan S2), dan POJK No. 51 Tahun 2017; Artikel ilmiah, laporan kajian ESG dari organisasi internasional (IAASB, IFAC, OECD), serta publikasi profesional (Deloitte, KPMG, PwC). Data diperoleh melalui situs resmi perusahaan, laman regulator, serta perpustakaan digital dan basis data jurnal akademik yang relevan.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu suatu teknik sistematis untuk menafsirkan makna dari isi dokumen melalui proses klasifikasi dan kategorisasi. Langkah-langkah dalam proses analisis meliputi:

Inventarisasi konten laporan keberlanjutan yang berkaitan dengan audit readiness, seperti metode pelaporan, struktur pelaporan ESG, serta keberadaan assurance dari pihak independen; Pengkodean (coding) terhadap temuan dokumen berdasarkan indikator audit readiness; Pembuatan matriks audit readiness untuk membandingkan antara laporan perusahaan yang diteliti; Interpretasi

ISSN: 3025-9495

hasil berdasarkan keterpenuhan indikator audit readiness dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Analisis dilakukan dengan fokus pada indikator yang dirumuskan dari kombinasi standar pelaporan keberlanjutan (GRI, ISSB), praktik assurance ESG (IAASB, IFAC), dan penelitian terdahulu (Suherman & Nasution, 2021; Hermawan et al., 2023).

5. Alat Bantu Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat bantu berupa matriks audit readiness, yang disusun berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- Ketersediaan informasi ESG yang terstruktur dan terdokumentasi;
- Penggunaan standar pelaporan internasional seperti GRI, SASB, atau ISSB;
- Pelibatan pihak independen dalam proses assurance laporan keberlanjutan;
- Integrasi pelaporan keberlanjutan dengan laporan tahunan atau laporan keuangan;
- Kejelasan metodologi pengumpulan data ESG;
- Frekuensi dan konsistensi pelaporan ESG selama periode penelitian

Matriks ini berfungsi untuk membandingkan kesiapan audit antar perusahaan secara sistematis dan membantu menghasilkan temuan yang objektif berdasarkan data dokumentasi.

6. Kredibilitas Data

Untuk memastikan kredibilitas dan validitas temuan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen (regulasi, laporan perusahaan, dan literatur ilmiah). Selain itu, validitas isi dijaga melalui penggunaan indikator yang bersumber dari standar internasional yang telah diakui dalam praktik audit dan pelaporan keberlanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Tingkat Audit Readiness Laporan Keberlanjutan BUMN (2021-2023)

Penelitian ini menganalisis laporan keberlanjutan dari tiga BUMN besar di Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN), dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Penilaian dilakukan dengan menggunakan matriks audit readiness berdasarkan enam indikator utama yang diturunkan dari standar GRI (2023), IAASB (2023), dan referensi akademik lainnya.

a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI)

BRI menampilkan performa audit readiness yang paling solid di antara tiga perusahaan. Laporan keberlanjutan BRI secara konsisten mengacu pada GRI Standards dan menunjukkan peningkatan kualitas pelaporan dari tahun ke tahun. Pada Sustainability Report 2022, BRI telah melibatkan pihak ketiga independen untuk melakukan limited assurance, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas (BRI, 2022). Laporan BRI tidak hanya menyajikan data kuantitatif ESG, tetapi juga menjelaskan secara eksplisit metodologi yang digunakan, termasuk cakupan dan prinsip materialitas. Dari sudut pandang audit readiness, hal ini mencerminkan kesiapan internal perusahaan dalam menyediakan data yang dapat diaudit, serta kesiapan eksternal dalam membangun sistem pelaporan yang sesuai dengan praktik terbaik global (IFAC, 2021).

b. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom)

Laporan keberlanjutan Telkom juga mengikuti standar GRI dan tersedia setiap tahun secara konsisten. Telkom menampilkan data ESG yang terstruktur, namun belum ada keterlibatan pihak independen untuk memberikan assurance terhadap laporan tersebut. Dalam Sustainability Report 2023, perusahaan menyatakan komitmen terhadap keberlanjutan, tetapi tidak menjelaskan secara rinci prosedur pengumpulan data dan proses validasinya. Dari perspektif audit readiness, Telkom berada pada tingkat menengah. Ketidakhadiran assurance eksternal menjadi kelemahan utama, karena mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap kredibilitas informasi non-

ISSN: 3025-9495

keuangan. Menurut Maniora (2021), ketidakhadiran assurance dapat memperlemah kepercayaan investor terhadap integritas laporan keberlanjutan.

c. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN)

PGN menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun, namun pelaporannya masih cenderung deskriptif. Meskipun mengacu pada GRI, banyak indikator yang belum disajikan dalam bentuk kuantitatif, serta tidak ada penjelasan mengenai penggunaan metodologi tertentu dalam menyusun laporan. Tidak ditemukan keterlibatan pihak assurance eksternal dalam laporan tahun 2021-2023. Dalam konteks audit readiness, PGN menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan data ESG yang terukur, tidak adanya penjelasan metodologi yang komprehensif, serta kurangnya audit trail yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan bagi auditor dalam memverifikasi validitas dan reliabilitas informasi ESG yang disajikan.

2 Matriks Audit Readiness Perusahaan BUMN (2021-2023)

Berikut adalah hasil pemetaan audit readiness berdasarkan enam indikator utama:

Indikator Audit Readiness	BRI	Telkom	PGN
Penggunaan standar GRI secara eksplisit	✓	✓	✓
Penjelasan metodologi pelaporan ESG	✓	–	–
Penyampaian data ESG yang terstruktur dan kuantitatif	✓	✓	–
Pelibatan pihak ketiga untuk assurance	✓	–	–
Integrasi laporan keberlanjutan dalam annual report	✓	X	X
Konsistensi pelaporan selama tiga tahun terakhir	✓	✓	✓

Keterangan:

✓ = Memadai dan konsisten

– = Ada namun belum optimal

X = Tidak tersedia

3 Pembahasan Temuan

a. Perbedaan tingkat kesiapan audit

Temuan menunjukkan bahwa perbedaan dalam kesiapan audit tidak hanya tergantung pada ukuran atau sektor perusahaan, tetapi juga pada komitmen manajemen terhadap prinsip-prinsip ESG dan tata kelola pelaporan. BRI, dengan pelibatan auditor independen dan penyusunan data yang komprehensif, menjadi contoh best practice yang dapat diadopsi oleh BUMN lain. Sebaliknya, ketidaksiapan Telkom dan PGN menunjukkan bahwa meskipun pelaporan dilakukan secara rutin, masih terdapat kekurangan dalam aspek teknis dan strategis pelaporan ESG. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Hermawan et al. (2023) yang menyatakan bahwa audit readiness dalam konteks ESG di Indonesia masih mengalami kesenjangan antar perusahaan.

b. Tantangan Audit Readiness

Beberapa tantangan umum yang ditemukan dalam laporan keberlanjutan BUMN antara lain:

- 1) Keterbatasan kompetensi audit internal dalam isu ESG, sebagaimana diungkapkan oleh Rahman dan Lestari (2022).
- 2) Minimnya panduan atau standar lokal yang mengikat untuk pelaksanaan assurance ESG, membuat perusahaan ragu melibatkan pihak ketiga.
- 3) Keterpisahan sistem pelaporan ESG dan keuangan, sehingga menghambat pendekatan integratif dalam audit keberlanjutan (IFAC, 2021; OECD, 2022).

4 Implikasi Temuan

Temuan ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi praktik audit dan regulasi di Indonesia:

- 1) Urgensi standarisasi audit keberlanjutan. Regulasi seperti POJK 51 sudah menjadi dasar, namun perlu diikuti oleh pedoman teknis audit ESG agar auditor memiliki kerangka kerja yang jelas.
- 2) Perluasan kompetensi auditor. Profesi audit harus mulai membangun keahlian lintas disiplin yang melibatkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- 3) Dorongan terhadap mandatory assurance. Pemerintah dan otoritas pasar modal dapat mempertimbangkan regulasi yang mewajibkan keterlibatan pihak ketiga dalam ESG assurance untuk meningkatkan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat audit readiness laporan keberlanjutan pada beberapa perusahaan BUMN di Indonesia dalam konteks meningkatnya tuntutan ESG disclosure. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keberlanjutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Tingkat audit readiness antar perusahaan BUMN belum merata. BRI menunjukkan kesiapan audit yang tinggi dengan pelaporan ESG yang komprehensif, transparan, serta melibatkan assurance independen. Sementara itu, Telkom dan PGN masih memiliki keterbatasan, terutama dalam pelibatan pihak ketiga, penjelasan metodologi, dan kuantifikasi data ESG. Pelaporan keberlanjutan telah mengikuti kerangka GRI dan POJK No. 51/POJK.03/2017, namun belum sepenuhnya mengadopsi praktik assurance yang direkomendasikan oleh standar internasional seperti IAASB (ISSA 5000) atau IFRS S1 & S2 dari ISSB. Audit readiness sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pelaporan internal, dukungan manajemen, dan keterlibatan profesional independen. Perusahaan yang memiliki sistem pelaporan ESG yang terintegrasi dan mendalam lebih siap untuk diaudit dan dapat memberikan keyakinan yang lebih tinggi kepada pemangku kepentingan.

Tantangan utama dalam pencapaian audit readiness mencakup minimnya kompetensi auditor terhadap isu ESG, kurangnya panduan audit ESG yang baku di Indonesia, dan masih rendahnya kesadaran terhadap pentingnya assurance atas laporan non-keuangan. Perlu adanya dorongan regulatif dan edukatif bagi perusahaan dan auditor untuk meningkatkan kapabilitas dalam audit keberlanjutan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pelaporan ESG tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana akuntabilitas dan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Secara keseluruhan, audit readiness atas laporan keberlanjutan masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama pada level implementasi. Diperlukan sinergi antara perusahaan, auditor, regulator, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem pelaporan ESG yang kredibel, terstandarisasi, dan dapat diaudit secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, J. R., & Simnett, R. (2021). ESG Assurance and the Role of Auditors. *Accounting Horizons*, 35(2), 37-58.
- Deloitte. (2022). *ESG Reporting and Assurance Trends 2022*. Deloitte Insights.
- GRI. (2023). *GRI Standards 2023 Update*. Global Reporting Initiative.
- Hermawan, A., Dewi, S. R., & Prabowo, H. (2023). *Kesiapan Auditor dalam Assurance Laporan Keberlanjutan*

ISSN: 3025-9495

di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 25(1), 33-48.

IAASB. (2023). Proposed International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000. International Auditing and Assurance Standards Board.

IFAC. (2021). The State of Play in Sustainability Assurance: 3rd Edition. International Federation of Accountants.

IFRS Foundation. (2023). IFRS S1 General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information.

IIRC. (2021). Integrated Thinking and Strategy: State of Play Report. International Integrated Reporting Council.

KPMG. (2022). Survey of Sustainability Reporting 2022. KPMG Global.